

**ANALISIS KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU
(PMK NOMOR 147/PMK.010/2016)
TERHADAP SEKTOR PEREKONOMIAN
DI INDONESIA**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Aristananda
12030214060134

**PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR

NAMA : ARISTANANDA
NIM : 12030214060134
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN
**JUDUL TUGAS AKHIR : “ANALISIS KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU (PMK NOMOR
147/PMK.010/2016) TERHADAP SEKTOR
PEREKONOMIAN DI INDONESIA”**

Semarang, 08 September 2017
Pembimbing Akademik

Darwanto,S.E., M.Si
NIP. 197808112008121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang diberi judul *“Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (PMK Nomor 147/PMK.010/2016) Terhadap Sektor Perekonomian di Indonesia”*.

Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pada Program Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak mungkin dapat terselesaikan secara baik dan benar tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suharnomo, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Drs. Bagio Mudakir, MT. selaku Ketua Pengelola Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Drs. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Program Studi Jurusan Perpajakan, Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Wahyu Widodo, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dosen Wali sejak penulis menjadi mahasiswa Program diploma III Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Darwanto, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Iman Prayitno, selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang.
7. Bapak Andi Purnawan, selaku Kepala Seksi Perbendaharaan Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang.
8. Bapak Eko Budyanto, S.Mn., M.M., selaku Kepala Subbagian Perbendaharaan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya Pabean A Semarang sekaligus sebagai Pembimbing Lapangan saat penulis melaksanakan Kuliah Kerja Praktik (KKP).

9. Seluruh pejabat dan pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang yang turut membantu dalam memberikan data kepada penulis.
10. Kedua orang tua penulis, yang sangat penulis sayangi dan cintai. Kesabaran dan ketulusan mereka dalam mendidik dan membimbing penulis serta selalu mendoakan dan mendukung penulis baik secara moral maupun materil.
11. Teman teman seperjuangan, Sartika, Evie, Seven, Niha, Diah, Aldo atas kebersamaannya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2014 D-III Perpajakan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas motivasi dan kekompakan kalian, semoga kita dapat meraih keberhasilan dan kesuksesan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun dan dapat membantu penyempurnaan penulisan ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 08 September 2017

Penulis,

Aristananda

NIM. 12030214060134

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup Penulisan	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan	
1.3.1. Tujuan Penulisan	6
1.3.2. Manfaat Penulisan	6
1.4. Cara Pengumpulan Data	
1.4.1. Data Penelitian	8
1.4.2. Metode Pengumpulan Data	8
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM	
KPPBC TIPE MADYA PABEAN A SEMARANG	
2.1. Sejarah Berdirinya KPPBC	
Tipe Madya Pabean A Semarang	10
2.2. Visi, Misi, dan Moto	
2.2.1. Visi	11
2.2.2. Misi	11
2.2.3. Moto	11

2.3.	Struktur Organisasi	12
2.4.	Tugas Pokok Dan Fungsi KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang	
2.4.1.	Tugas Pokok	12
2.4.2.	Fungsi	12
2.5.	Gambaran Umum Pegawai	13
2.6.	Uraian Tugas Pegawai	
2.6.1.	Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang	14
2.6.2.	Subbagian Umum	14
2.6.3.	Seksi Penindakan & Penyidikan	15
2.6.4.	Seksi Perbendaharaan	16
2.6.5.	Seksi Penyuluhan & Layanan Informasi	16
2.6.6.	Seksi Kepatuhan Internal	17
2.6.7.	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	17
2.7.	Janji Pelayanan	
2.7.1.	Pelayanan Kawasan Berikat	18
2.7.2.	Pelayanan Cukai	18
2.7.3.	Pelayanan Lainnya	19
2.8.	Budaya Kerja Kementerian Keuangan	19
2.9.	Wilayah Kerja	20
2.10.	Sistem Kerja	21
2.11.	Disiplin dan Keselamatan Kerja	
2.11.1.	Disiplin Kerja	21
2.11.2.	Keselamatan Kerja	21
2.12.	Target Penerimaan	22

BAB III PEMBAHASAN

3.1.	Uraian Teori	
3.1.1.	Pengertian Cukai	23
3.1.2.	Subjek Cukai	23
3.1.3.	Barang Kena Cukai	24
3.1.4.	Sistem Tarif dan Kebijakan Cukai	25
3.1.5.	Ketentuan Tarif Cukai	27
3.1.6.	Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) Hasil Tembakau	28
3.1.7.	Faktor Penentuan Tarif Sehubungan dengan Perkembangan Fungsi Cukai	29
3.1.8.	Pita Cukai Hasil Tembakau	29
3.2.	Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau	31
3.3.	Industri Hasil Tembakau	35
3.4.	Penerimaan Cukai Hasil Tembakau	37
3.5.	Dampak Adanya Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau	
3.5.1.	Dampak Positif	39
3.5.2.	Dampak Negatif	41

BAB IV PENUTUP

4.1.	Rangkuman	43
4.2.	Kesimpulan	44

DAFTAR PUSTAKA	45
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	48
-----------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Penerimaan Negara dari Pajak Dalam Negeri	4
Gambar 2.3.	Struktur Organisasi	
	KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang.....	12
Gambar 2.9.	Wilayah Kerja	
	KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang	21
Gambar 3.3.(a)	Perkembangan Jumlah Pabrik	
	Industri Hasil Tembakau di Indonesia	36
Gambar 3.3.(b)	Persentase Produksi Hasil Tembakau di Indonesia	37
Gambar 3.4.	Penerimaan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.7.1.	Rincian Pelayanan Kawasan Berikat	18
Tabel 2.7.2.	Rincian Pelayanan Cukai	18
Tabel 2.7.3	Rincian Pelayanan Lainnya	19
Tabel 2.12.	Target dan Realisasi	
	KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang	22
Tabel 3.2.(a)	Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram Hasil	
	Tembakau Buatan Dalam Negeri (PMK Nomor 198/PMK.010/2015)....	31
Tabel 3.2.(b)	Tarif Cukai Dan Harga Jual Eceran Minimum Hasil Tembakau	
	Yang Diimpor (PMK Nomor 198/PMK.010/2015)	32
Tabel 3.2.(c)	Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau	
	(PMK Nomor 147/PMK.010/2016).....	33
Tabel 3.2.(d)	Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram Hasil	
	Tembakau Buatan Dalam Negeri (PMK Nomor 147/PMK.010/2016).....	33
Tabel 3.2.(e)	Tarif Cukai Dan Harga Jual Eceran Minimum Hasil Tembakau	
	Yang Diimpor (PMK Nomor 147/PMK.010/2016).	34
Tabel 3.2.(f)	Kebijakan Cukai Hasil Tembakau	
	Lima Tahun Terakhir	35
Tabel 3.3.	Rincian Perkembangan Jumlah Pabrik	
	Industri Hasil Tembakau Tahun 2015	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Penilaian Prestasi Kerja Praktik
- Lampiran 2 PMK Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
- Lampiran 3 PMK Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan ketiga
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menghadapi era reformasi yang semakin berkembang ini, kita dituntut untuk dapat menunjukkan kemampuan terbaik dalam pembangunan bangsa dan negara. Munculnya berbagai permasalahan ekonomi, khususnya di bidang keuangan negara merupakan sebuah tantangan yang harus kita jawab bersama. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya berbagai penyimpangan dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu, perkembangan hukum keuangan negara jangan sampai ditujukan untuk kepentingan, kemanfaatan, dan keuntungan bagi pihak tertentu saja, melainkan ditujukan untuk kepentingan bersama, agar dapat tercapainya cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum dengan jumlah penduduk yang sangat padat, untuk itu pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan negara agar terciptanya pembangunan nasional, yang menjadikan masyarakat sejahtera, adil dan makmur serta terlepas dari ketergantungan negara lain. Penerimaan negara sendiri salah satunya diperoleh dari sektor dalam negeri, antara lain hasil perusahaan-perusahaan negara, denda-denda, hak waris atas peninggalan terlantar, hasil-hasil bumi, termasuk pungutan-pungutan berupa pajak.

Pajak di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting bagi roda pemerintahan yang ada, hal ini dapat dilihat dari pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak menjadi sektor utama dalam membiayai pengeluaran negara, khususnya untuk pengeluaran rutin negara pada masa sekarang ini. Tanpa adanya pemasukan dari pajak, maka negara tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak adanya dana yang dipakai untuk pembangunan. Semakin maju sebuah negara maka kesadaran akan pentingnya membayar pajak juga semakin tinggi, karena dengan membayar pajak maka sarana dan prasarana yang dibutuhkan akan semakin terpenuhi.

Penerimaan dari sektor pajak sendiri terdiri pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Untuk pajak dalam negeri dapat diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pajak- pajak lainnya termasuk pungutan Bea (Bea Masuk, Bea Keluar) dan Cukai.

Bea dan Cukai dibuat oleh departemen keuangan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hubungan antara Pajak Negara yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan kewajiban Bea dan Cukai yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) saling berkaitan erat. Istilah kewajiban dalam pajak dikenakan terhadap individu, sedangkan Bea dan Cukai dikenakan terhadap aktivitas memasukkan atau mengeluarkan barang atau transaksi keuangan dari dan/atau ke luar negeri yang tidak bersifat individual.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan) RAPBN-P tahun 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016 jumlah realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 775,2 triliun atau sebesar 43,4 % dari target (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan) APBN-P tahun 2016 sebesar Rp 1.786,2 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp 1.037,6 triliun atau sebesar 49,8 % dari target APBN-P tahun 2016 sebesar Rp 2.082,9 triliun. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit APBN mencapai sebesar Rp 262,4 triliun atau 2,08 % terhadap (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) APBD.

Penerimaan dalam negeri dari perpajakan sampai dengan minggu pertama bulan agustus 2016 mencapai sekitar Rp618,3 Triliun (40,2% dari APBN-P 2016), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 yang mencapai sekitar Rp626,7 Triliun (42,1% dari APBN-P 2016). Penerimaan perpajakan tersebut bersumber dari Penerimaan Pajak sebesar Rp542,1 Triliun (40,0% dari APBN-P 2016) dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp76,6 Triliun (41,4% dari APBN-P 2016).

Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tentang Cukai yang merupakan penerimaan Negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan.

Pungutan cukai sendiri merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang memiliki ciri khusus dan berbeda dengan pungutan pajak lainnya. Ciri khusus yang dimaksud yaitu adanya sifat dan karakteristik tertentu pada objek yang dikenakan cukai. Sifat dan karakteristik pemungutan cukai didasari oleh pembatasan pemakaian oleh masyarakat karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Barang Kena Cukai (BKC) yang dikenakan cukai meliputi Etil alkohol atau etanol, Minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dan Hasil Tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya). Dalam Tugas Akhir ini, penulis menitik beratkan pada pembahasan mengenai objek Cukai Hasil Tembakau.

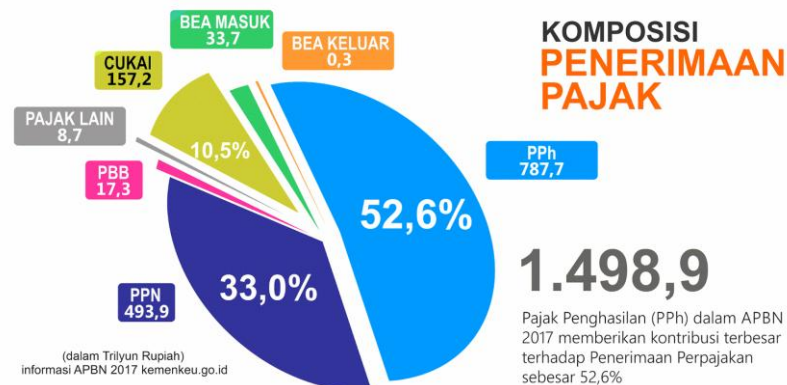
Pelaksanaan tarif cukai hasil tembakau berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam rangka pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau, dalam hal kepentingan penerimaan negara, serta untuk memudahkan pemungutan dan pengawasan barang kena cukai, maka diterapkan sistem tarif cukai spesifik. Sejak tahun 2012 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sepakat untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau dan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) sebagai salah satu upaya pencapaian target penerimaan pajak.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat kontribusi cukai terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga kini berada pada kisaran 10-12%. Untuk tahun 2014 kontribusi cukai terhadap APBN adalah sebesar 12,29%, tahun 2015 sebesar 11,68%, dan tahun 2016 sebesar 11,72%.

Di tahun 2017, ditargetkan penerimaan cukai sebesar 149,8 triliun, yang merupakan 10,5% dari total penerimaan pajak. Walaupun ada sedikit penurunan,

namun kontribusinya masih cukup signifikan. Artinya, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mengamankan kebijakan cukai. Karena apabila meleset, akan langsung berkaitan dengan APBN yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembangunan nasional. Komposisi penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak dalam RAPBN 2017 lebih rinci dapat terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Penerimaan Negara dari Pajak Dalam Negeri



Sumber: Kementerian Keuangan, RAPBN 2017

Berkaitan dengan hal di atas, maka di tahun 2017 pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai yang baru melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 147/PMK.010/2016. Dengan rata-rata tertimbang sebesar 10,01% dapat menjaga pertumbuhan produksi pada kisaran $\pm 1\%$. Beberapa studi menyatakan bahwa kenaikan rata-rata tarif cukai 10% dapat menurunkan konsumsi sebesar 0,9% (Djutaharta, et al, 2005). Hal ini tentunya sejalan dengan arah pengendalian konsumsi dimana ketika produksi rokok stabil maka konsumsi pun dapat terkendali.

Kebijakan kenaikan tarif tersebut sudah dibicarakan dengan berbagai *stakeholder*, baik pihak yang peduli dengan kesehatan dan lapangan pekerjaan, petani tembakau, maupun asosiasi pengusaha rokok. Selain itu juga dilakukan pertemuan dan diskusi dengan pemerintah daerah, yayasan, dan universitas. Dari

pertemuan dan diskusi yang diselenggarakan, ditarik kesimpulan bahwa kenaikan cukai merupakan langkah yang harus ditempuh dalam rangka pengendalian konsumsi dan produksi.

Di sisi lain, pemerintah juga menyadari bahwa rokok telah merugikan kesehatan masyarakat sehingga harus dibatasi. Hal ini sejalan dengan prinsip pengenaan cukai yaitu untuk mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredarannya. Selain aspek kesehatan, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek lain dari rokok, yaitu tenaga kerja, peredaran rokok ilegal, petani tembakau, dan penerimaan negara. Oleh karena itu, menurutnya seluruh aspek tersebut perlu dipertimbangkan secara komprehensif dan berimbang dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan harga dan cukai rokok.

Adanya kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau juga memberikan pengaruh terhadap penerimaan, industr hasil tembakau/ pengusaha rokok, maupun bagi para konsumen rokok sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul tentang **“ANALISIS KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU (PMK NOMOR 147/PMK.010/2016) TERHADAP SEKTOR PEREKONOMIAN DI INDONESIA”** sebagai bahan permasalahan Tugas Akhir ini.

1.2. Ruang Lingkup

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Dasar pertimbangan Pemerintah dalam menetapkan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (PMK Nomor 147/PMK.010/2016).
2. Efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil terhadap penerimaan negara.
3. Dampak adanya kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau terhadap sektor perekonomian di Indonesia.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Pemerintah dalam menetapkan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (PMK Nomor 147/PMK.010/2016).
2. Untuk mengetahui efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil terhadap penerimaan negara.
3. Untuk mengetahui dampak adanya kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau terhadap sektor perekonomian di Indonesia.

1.3.2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini dapat diperoleh beberapa manfaat bagi mahasiswa, Pengelola Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Semarang, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Mahasiswa
 - a. Melatih mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja yang nyata dan memberikan kemampuan beradaptasi dan bersosialisasi terhadap lingkungan kerja.
 - b. Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman serta mengetahui proses kerja dan kegiatan yang ada di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang.
 - c. Agar mahasiswa memahami penerapan berbagai perangkat perpajakan yang telah dipelajari selama mengikuti kuliah atau laboratorium di Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro pada perusahaan atau instansi saat pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik (KKP).

- d. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk dapat memahami permasalahan nyata dunia kerja yang tidak diperoleh selama perkuliahan, dan mampu untuk menggunakan perangkat perpajakan dalam menghadapi permasalahan tersebut.
- e. Mempelajari bentuk kerja sama tim yang baik.

2. Manfaat bagi Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis

- a. Memperoleh bahan masukan bagi pengembangan kurikulum serta modul untuk laboratorium.
- b. Meningkatkan kualitas lulusan Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis sesuai dengan kebutuhan pasar.
- c. Secara tidak langsung meningkatkan citra Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan menarik minat calon mahasiswa sebagai akibat dari kualitas lulusan yang baik dan diserap oleh pasar.
- d. Meningkatkan hubungan kerja sama antara pihak Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dengan KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang.
- e. Memberi bukti nyata atas disiplin ilmu yang diterapkan.

3. Manfaat bagi KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang

- a. Membina hubungan kerja sama yang baik antara pihak Universitas Diponegoro khususnya Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang.
- b. KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dapat memanfaatkan tenaga mahasiswa dalam kegiatan perusahaan.
- c. KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dapat menjadikan pengetahuan mahasiswa sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan tugas rutin kantor.
- d. Meningkatkan hubungan kerja sama lembaga pendidikan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

1.4. Cara Pengumpulan Data

1.4.1. Data Penelitian

a. Data Primer

Yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mengadakan observasi dan wawancara interview pada pihak-pihak yang terkait tentang cukai hasil tembakau, dalam hal ini penulis memperoleh data dan informasi langsung dari pegawai yang ada KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang berasal dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu, atau bisa juga dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan cukai hasil tembakau. Dalam hal ini, penulis menggunakan data sekunder melalui peraturan undang-undang yang berhubungan dengan cukai, serta dari data target dan realisasi penerimaan cukai.

1.4.2. Metode Penelitian

a. Metode Wawancara

Yaitu melakukan wawancara langsung kepada pejabat dan pegawai di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang khususnya pada bagian seksi Perbendaharaan dan seksi Pelayanan Kepabeanan Dan Cukai, yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang bermanfaat bagi penyusunan Tugas Akhir.

b. Metode Observasi

Yaitu studi yang dilakukan dengan pengamatan langsung atas kegiatan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang untuk melihat dan mengetahui berbagai fenomena yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik (KKP).

c. Daftar Dokumentasi

Daftar dokumentasi dapat berupa data penerimaan pajak, penerimaan cukai hasil tembakau, data cukai hasil tembakau lainnya, struktur organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang, serta dokumentasi yang lain sebagai pelengkap Tugas Akhir ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan Tugas Akhir, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A SEMARANG

Bab ini diuraikan mengenai sejarah berdirinya lokasi Kuliah Kerja Praktik (KKP), dalam hal ini penulis melakukannya KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang. Dijelaskan juga mengenai struktur organisasi, visi dan misi, tata cara laksana yang di laksanakan, dsb.

BAB III :PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan pembahasan tentang ruang lingkup penulisan yang telah disampaikan denagn melihat teori yang telah didapat selama perkuliahan yang dibandingkan dengan praktik yang ada di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang.

BAB VI :PENUTUP

Bab ini berisi rangkuman dari pembahasan dan kesimpulan penulis sehubungan dengan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM

KPPBC TIPE MADYA PABEAN A SEMARANG

2.1. Sejarah Berdirinya KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang

Semarang, Jawa Tengah, kota yang berada di pesisir utara Pulau Jawa, menjadi pusat pemerintahan, perdagangan dan industri di Jawa Tengah, dan merupakan salah satu pintu gerbang keluar masuknya barang-barang dari dan/atau keluar negeri melalui Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani.

Pada awalnya seluruh kegiatan kepabeanan dan cukai berada di bawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Seiring dengan berjalannya waktu dan juga keinginan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih fokus dan lebih baik kepada para pengguna jasa, maka dibentuklah KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang, yang merupakan *split off* dari KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 71/BC/2015 tentang Pembentukan KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang.

Pada tanggal 01 Juli 2015 bertempat di Auditorium Sabang Gedung Sumatera Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, secara serentak dilaksanakan peresmian 6 (enam) instansi vertikal baru di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai oleh Heru Pambudi selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai, termasuk salah satunya KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang. Kemudian tanggal 03 Juli 2015 bertempat di *Lobby* lantai 1 Gedung Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dilaksanakan peresmian KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang, oleh Untung Basuki selaku Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta yang dihadiri oleh *stake holders* dan instansi terkait di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Kepala

KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas kepada Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang.

Wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kota Madya Salatiga dan Kota Madya Semarang, dan menangani seluruh kegiatan Tempat Penimbunan Berikat dan Cukai, yang terdiri dari 110 Kawasan Berikat, 2 Gudang Berikat, 24 Pabrik Hasil Tembakau dan 7 Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta memperlancar pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat, KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang didukung oleh sarana dan prasarana antara lain gedung utama kantor yang dilengkapi dengan ruang pelayanan beserta ruang tunggu yang nyaman, ruang layanan informasi, ruang rapat, control room, mushola, toilet serta ruang untuk seluruh pegawai beserta prasarana lainnya.

2.2. Visi, Misi, dan Motto

2.2.1. Visi

Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia

2.2.2. Misi

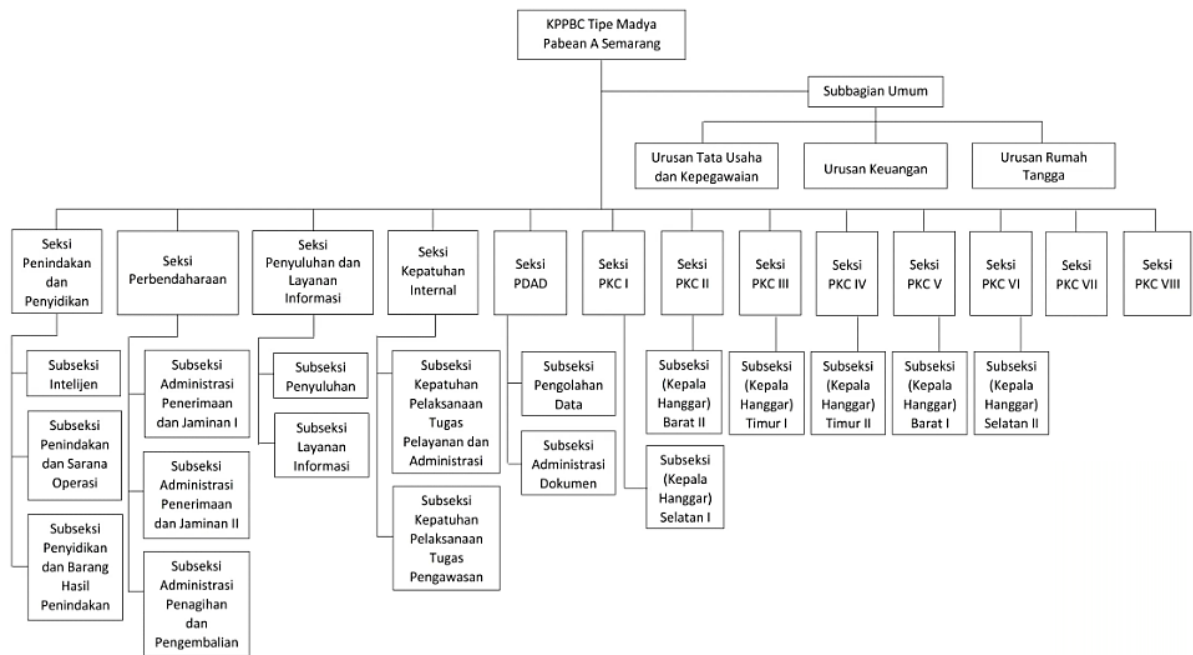
- a. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri.
- b. Kami menjaga perbataasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyeludupan dan perdagangan ilegal; dan
- c. Kami mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

2.2.3. Motto

“LEBIH FOKUS, LEBIH BAIK”

2.3. Struktur Organisasi

Gambar 2.3.
Struktur Organisasi
KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang



Sumber: Website KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang

2.4. Tugas Pokok dan Fungsi KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang

2.4.1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2. Fungsi

- Trade Fasilitator*, Memberi fasilitas perdagangan, diantaranya melaksanakan tugas titipan dari instansi lain.

- b. *Industrial Assistance*, Melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri.
- c. *Comunity Protector*, Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya.
- d. *Revenue Collector*, Memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai secara maksimal.

2.5. Gambaran Umum Pegawai

Kepegawaian berdasarkan Unit Kerja:

- a. Subbagian Umum
 - Urusan Tata Usaha Dan Kepegawaian
 - Urusan Keuangan
 - Urusan Rumah Tangga
- b. Seksi Penindakan Dan Penyidikan
 - Subseksi Intelijen
 - Subseksi Penindakan Dan Sarana Operasi
 - Subseksi Penyidikan Dan Barang Hasil Penindakan
- c. Seksi Perbendaharaan
 - Subseksi Administrasi Penerimaan Dan Jaminan I
 - Subseksi Administrasi Penerimaan Dan Jaminan II
 - Subseksi Administrasi Penagihan Dan Pengembalian
- d. Seksi Penyuluhan Dan Layanan Informasi
 - Subseksi Penyuluhan
 - Subseksi Layanan Informasi
- e. Seksi Kepatuhan Internal
 - Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan Dan Administrasi
 - Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan
- f. Seksi PDAD
 - Subseksi Pengolahan Data

- Subseksi Administrasi Dokumen

g. Seksi Pelayanan Kepabeanan Dan Cukai (VII)

- Subseksi Hanggar Pabean Dan Cukai

2.6. Uraian Tugas Pegawai

2.6.1. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang bertugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6.2. Subbagian Umum

Subbagian Umum bertugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas, dan evaluasi kinerja serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. Subbagian Umum terdiri dari:

a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian

Bertugas melakukan urusan kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

b. Urusan Keuangan

Bertugas melakukan urusan keuangan anggaran belanja pegawai.

c. Urusan Rumah Tangga

Tugasnya :

- Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- Melaksanakan pengawasan penggunaan, pengurusan, pemeliharaan, kendaraan dinas (pool) dan kendaraan dinas pimpinan;
- Melaksanakan pengurusan surat-surat kendaraan dinas ;

- Melaksanakan pengurusan keperluan rumah jabatan
- Melakukan pengadaan, pengaturan, perawatan, dan pemeliharaan barang-barang yang menjadi kewenangannya;
- Melaksanakan administrasi, inventarisasi dan pelaporan hasil pengadaan barang yang menjadi kewenangannya;
- Melaksanakan pengendalian, analisis kebutuhan dan pemakaian listrik, air dan telepon pada satuan kerja;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Umum.

2.6.3. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan bertugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari:

a. Subseksi Intelijen

Bertugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen, serta pengelolaan pangkalan data intelijen.

b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi

Bertugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, pengendalian tindak lanjut hasil penindakan, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Wilayah.

c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Bertugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan,

pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan dan premi.

2.6.4. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan bertugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan

Bertugas melakukan penerimaan penatausahaan, pendistribusian dan penelitian penyelesaian manifest kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pemberitahuan pengangkutan barang.

b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian

Bertugas melakukan pengadministrasian penerimaan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, dan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor serta penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya.

2.6.5. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Seksi Kepatuhan dan Penyuluhan bertugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Kepatuhan dan Penyuluhan terdiri dari:

a. Subseksi Penyuluhan

Bertugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi dan publikasi di bidang kepabeanan dan cukai.

b. Subseksi Layanan Informasi

Bertugas menyediakan dan memberikan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

2.6.6. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Seksi Kepatuhan Internal terdiri dari:

a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi

Bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja dan menyiapkan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi. intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja dan menyiapkan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

2.6.7. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai bertugas melakukan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

2.7. Janji Pelayanan

2.7.1. Pelayanan Kawasan Berikat

Tabel 2.7.1.
Rincian Pelayanan Kawasan Berikat

Jenis Layanan	Waktu	Ketentuan	Biaya
Perizinan Subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP (BC.26.1)	3 Hari Kerja	Sejak Permohonan dan Dokumen Persyaratan Diterima Lengkap dan Benar	Tidak Ada Biaya
Perizinan Subkontrak dari TLDDP ke Kawasan Berikat (BC.26.2)	3 Hari Kerja	Sejak Permohonan dan Dokumen Persyaratan Diterima Lengkap dan Benar	Tidak Ada Biaya
Perizinan Subkontrak dari TLDDP ke Kawasan Berikat (BC.2.7)	3 Hari Kerja	Sejak Permohonan dan Dokumen Persyaratan Diterima Lengkap dan Benar	Tidak Ada Biaya
Rekomendasi Pemberian Izin Tempat Penimbunan Berikat	10 Hari Kerja	Sejak Permohonan dan Dokumen Persyaratan Diterima Lengkap dan Benar	Tidak Ada Biaya
Rekomendasi Perpanjangan Izin Kawasan Berikat	7 Hari Kerja	Sejak Permohonan dan Dokumen Persyaratan Diterima Lengkap dan Benar	Tidak Ada Biaya
Pemberian Izin Penandatanganan Bahab Baku antar Kawasan Berikat dalam Satu Manajemen	3 Hari Kerja	Sejak Permohonan dan Dokumen Persyaratan Diterima Lengkap dan Benar	Tidak Ada Biaya
Pelayanan BC.2.5	2 Hari Kerja	Setelah LHP Diterima oleh Petugas	Tidak Ada Biaya

Sumber: Website KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang

2.7.2. Pelayanan Cukai

Tabel 2.7.2.
Rincian Pelayanan Cukai

Jenis Layanan	Waktu	Ketentuan	Biaya
Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai awal (P3C) Secara Elektronik	25 Menit	Sejak Dokumen Pengajuan P3C awal Diterima Lengkap dan Benar	Tidak Ada Biaya
Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Tambahan Hasil Tembakau (P3C Tambahan HT) Secara Elektronik	25 Menit	Sejak Dokumen Pengajuan P3C Tambahan Diterima Lengkap dan Benar	Tidak Ada Biaya
Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai Hasil Te,mbakau	4 Hari Kerja	Sejak Dokumen Pengajuan Penundaan Cukai HT Diterima Lengkap dan Benar	Tidak Ada Biaya
Permohonan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	2 Hari Kerja	Sejak PMCK-6 Diterima Lengkap dan Benar)	Tidak Ada Biaya
Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merk Baru	1 Hari Kerja	Sejak Permohonan dan Dokumen Pendukung Diterima Lengkap dan Benar	Tidak Ada Biaya
Pelayanan Persetujuan Pengembalian Cukai atas Pita Cukai uyang Rusak atau Tidak Dipakai	3 Hari Kerja	Sejak PBCK-4 & CK-1/CK-1A Lengkap dan Benar Disertai Pita Cukai yang Dikembalikan	Tidak Ada Biaya

Sumber: Website KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang

2.7.3. Pelayanan Lainnya

Tabel 2.7.3.
Rincian Pelayanan Lainnya

Jenis Layanan	Waktu	Ketentuan	Biaya
Penerbitan Rekomendasi Anggota EDI Kepabeanan	1 Hari Kerja	Setelah Dilakukan Stock Opname dan Penunjukan Pegawai di Perusahaan Tersebut	Tidak Ada Biaya
Layanan Informasi oleh Unit Pelayanan Informasi yang Tidak Memerlukan Informasi Unit Lain	25 Menit	Sejak Diterimanya Formulir Permohonan Informasi/ Bimbingan dari Pengguna Jasa	Tidak Ada Biaya
Informasi oleh Unit Pelayanan Informasi yang Tidak Memerlukan Informasi Unit Lain	60 Menit	Sejak Diterimanya Formulir Permohonan Informasi/ Bimbingan dari Pengguna Jasa	Tidak Ada Biaya
Pelayanan Penerimaan Pengaduan Masyarakat	30 Menit	Sejak Diterima Dan Direkam di SIPUMA s.d. Pengadu Mendapatkan Tiket Pengaduan (Apabila Pengadu Datang Langsung)	Tidak Ada Biaya
Penanganan/ Proses Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	7 Hari Kerja	Sejak Pengaduan Diterima dan Dilampiri Dengan Bukti Awal yang Cukup s.d. Tahap Klarifikasi, Konfirmasi, dan Penelitian Kebenaran Materi	Tidak Ada Biaya

Sumber: Website KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang

2.8. Budaya Kerja Kementerian Keuangan

Adapun yang menjadi budaya kerja dalam lingkungan Kementerian Keuangan adalah:

a. Satu Informasi Setiap Hari

Mendorong seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan (Pegawai Kementerian Keuangan) mencari informasi yang positif dan membaginya (sharing) dengan Pegawai Kementerian Keuangan lainnya untuk pengetahuan bersama.

b. Dua Menit Sebelum Jadwal

Melatih, membiasakan dan menumbuhkan kedisiplinan seluruh Pegawai Kementerian Keuangan dengan hadir di ruang/tempat rapat 2 (dua) menit sebelum rapat di mulai sesuai jadwal, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi rapat.

c. Tiga Salam Setiap Hari

Mendorong seluruh Pegawai Kementerian Keuangan terbiasa memberikan pelayanan terbaik dan bersikap sopan serta santun, dengan memberikan salam sesuai dengan waktunya, yaitu selamat pagi, selamat siang dan selamat sore.

d. Rencana, Kerjakan, Monitor dan Tindaklanjuti

Agar seluruh Pegawai Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari menerapkan etos kerja dan prinsip manajemen/organisasi yang baik, dengan senantiasa membuat perencanaan terlebih dahulu, mengerjakan hingga tuntas, memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi dan melaporkan hasilnya, dan menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan.

e. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin

Mendorong tumbuhnya kesadaran, keyakinan, dan kepedulian Pegawai Kementerian Keuangan akan pentingnya penataan ruang kantor dan dokumen kerja yang ringkas, rapi, resik/bersih melalui perawatan yang dilakukan secara rutin, agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman guna meningkatkan etos kerja dan semangat berkarya.

2.9. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang terdiri dari:

- a. Kota Semarang
- b. Kabupaten Semarang
- c. Demak
- d. Grobongan
- e. Salatiga
- f. Kendal

Gambar 2.9.

Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang



Sumber: Website KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang

2.10. Sistem Kerja

KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang sebagai salah satu unit pelayanan yang melaksanakan tugas dan fungsi DJBC berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta memiliki lingkup kerja yang relatif lengkap, mulai kegiatan impor, ekspor, TPB hingga cukai.

2.11. Disiplin Kerja dan Keselamatan Kerja

2.11.1. Disiplin Kerja

- a. Para pegawai diwajibkan datang tepat waktu pukul 7.30
- b. Menggunakan pakaian sesuai ketentuan, bersih dan rapi
- c. Para pegawai tidak diizinkan untuk meninggalkan kantor sebelum jam pulang kecuali mendapatkan izin dari atasan yang bersangkutan.
- d. Para pegawai harus menaati segala peraturan yang telah ditetapkan.

2.11.2. Keselamatan Kerja

- a. Hampir di setiap ruangan terdapat kotak P3K untuk keselamatan para pegawai apabila terjadi hal yang tidak diinginkan

- b. Terdapat poliklinik untuk para pegawai
- c. Mempunyai alat pemadam kebakaran untuk menangani apabila ada hal yang tidak diinginkan.

2.12. Target Penerimaan

Tabel 2.12.
Target dan Realisasi
KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang Tahun 2015

Bulan		Target Tahunan	Realisasi
Juli	BM	10.289.916.600,00	1.554.034.000,00
	HT	930.528.929.496,74	57.902.820.000,00
	MMEA	566.178.059.653,78	47.700.252.000,00
	TOTAL	1.506.996.905.750,52	107.157.106.000,00
Agustus	BM	10.289.916.600,00	2.020.775.000,00
	HT	930.528.929.496,74	88.398.187.200,00
	MMEA	566.178.059.653,78	55.475.652.000,00
	TOTAL	1.506.996.905.750,52	145.894.614.200,00
September	BM	10.289.916.600,00	2.411.252.000,00
	HT	930.528.929.496,74	79.159.818.240,00
	MMEA	566.178.059.653,78	63.118.001.120,00
	TOTAL	1.506.996.905.750,52	144.689.071.360,00
Oktober	BM	10.289.916.600,00	2.576.542.000,00
	HT	463.122.720.480,00	76.787.291.470,00
	MMEA	602.123.572.000,00	75.958.849.880,00
	TOTAL	1.075.536.209.080,00	155.322.683.350,00
November	BM		
	HT		
	MMEA		
	TOTAL		
Desember	BM		
	HT		
	MMEA		
	TOTAL		
TOTAL	BM	41.159.666.400,00	8.562.603.000,00
	HT	3.254.709.508.970,22	302.248.116.910,00
	MMEA	2.300.657.750.961,34	242.252.755.000,00
	TOTAL	5.596.526.926.331,56	553.063.474.910,00

Sumber: Website KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Uraian teori

3.1.1. Pengertian Cukai

Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tentang Cukai, yang merupakan salah satu penerimaan Negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan.

Yang dimaksud barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut :

- Konsumsinya perlu dikendalikan;
- Peredarannya perlu diawasi;
- Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
- Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.

3.1.2. Subjek Cukai

Subjek cukai adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pungutan cukai, dalam undang-undang cukai subjek yang dimaksud adalah:

- a. Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai
- b. Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol
- c. Importir Barang Kena Cukai
- d. Penyalur Etil Alkohol
- e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol

3.1.3. Barang Kena Cukai

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang termasuk dalam barang kena cukai adalah :

- a. **Etil Alkohol (Etanol)**, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, yaitu berupa barang cair, jernih dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
- b. **Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)**, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk Konsentrat yang mengandung Etil Alkohol, yaitu semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya, yang antara lain : bir, shandy, anggur, gin, whisky dan yang sejenisnya.
- c. **Hasil Tembakau**, yang meliputi:
 - *Sigaret*, adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
 - *Sigaret Kretek*, adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan.
 - *Sigaret Putih*, adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak atau kemenyan.
 - *Sigaret Kretek/ Sigaret Putih yang dibuat dengan Mesin*, adalah sigaret yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin.

- *Sigaret Kretek/ Sigaret Putih yang dibuat dengan cara lain dari pada Mesin* adalah sigaret yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai tanpa menggunakan mesin.
- *Sigaret Kelembak Kemenyan*, adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- *Cerutu*, adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- *Rokok Daun*, adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot) atau sejenisnya dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- *Tembakau Iris*, adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- *Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya*, adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut di atas yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

3.1.4. Sistem Tarif dan Kebijakan Tarif Cukai

Yang dimaksud dengan tarif cukai adalah tarif yang ada kaitannya dengan harga barang yang dikenakan cukai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sistem tarif dan kebijakan tarif cukai hasil tembakau menganut sistem tarif berikut ini:

a. *Sistem Tarif Cukai Advalorum*

Yaitu tarif cukai berdasarkan presentase tarif dikalikan dengan harga dasar barang kena cukai. Harga Dasar disini dapat berupa Harga Jual Pabrik (HJP) atau Harga Jual Eceran (HJE).

Contoh:

Sigaret Putih Mesin (SPM) dikenakan cukai dengan tarif sebesar 57% dari Harga Jual Eceran-nya.

b. *Sistem Tarif Cukai Spesifik*

Yaitu tarif cukai berdasarkan besaran nilai dalam satuan rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai dalam bentuk satuan atau berat barang.

Contoh: Etil Alkohol dikenakan tarif cuaki sebesar Rp10.00,-/liter.

c. *Sistem Tarif Cukai Gabungan (Advalorum dan Spesifik)*

Sistem Tarif dan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau yang diterapkan pada saat ini menganut *Sistem Tarif Cukai Gabungan (Advalorum dan Spesifik)*, yaitu tarif cukai berdasarkan presentase tarif dikalikan dengan harga dasar barang kena cukai, dan tarif cukai berdasarkan besaran nilai dalam satuan rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai dalam bentuk satuan atau berat barang.

Contoh:

Sigaret Putih Mesin (SPM) dikenakan cukai dengan tarif sebesar 57% dari Harga Dasar, ditambah dengan penetapan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar Rp7,-/batang.

Pertimbangan diterapkannya sistem tarif gabungan seperti di atas, antara lain untuk kepentingan penerimaan negara, pembatasan barang kena cukai (produksi, peredaran dan konsumsi), dan kepentingan pertumbuhan perekonomian nasional (kesempatan kerja, produsen, petani dan konsumen).

Oleh karena itu dalam penerapan kebijakan tarif, walaupun kebijakannya senantiasa dikaitkan dengan peningkatan penerimaan cukai, namun demikian ketika menetapkan tarif maksimum, penetapan ini

hendaknya dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang, karena menurut Teori Arthur Laffer, (Permana Agung, DR, Msc, 1999):

Tingkat tarif yang semakin tinggi tidak selalu akan menghasilkan penerimaan cukai yang semakin tinggi pula, karena pada tingkat tertentu, yaitu pada saat mencapai area yang dikenal sebagai “Prohibitive Range for Government”, penerimaan cukai akan menurun.

Apabila penerimaan cukai terlalu besar, hal ini tidak saja dapat menimbulkan dampak terhadap perekonomian di sektor hulu (petani tembakau dan petani cengkeh), tetapi juga dapat menimbulkan dampak di sektor hilir (industri rokok dan perluasan tenaga kerja).

3.1.5. Ketentuan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Barang Kena Cukai Lainnya

Berdasarkan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995), adalah sebagai berikut:

- (1). Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
 - a. Untuk yang dibuat di Indonesia:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
 - b. Untuk yang diimpor:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

- (2). Barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
- a. Untuk yang dibuat di Indonesia:
 1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
 - b. Untuk yang diimpor:
 1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 2. 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

3.1.6. Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau

Kebijakan Harga Jual Eceran (HJE) ditentukan berdasarkan fungsi pemungutan cukai yang antara lain mempertimbangkan:

- a. Pendapatan bagi negara, dimana cukai merupakan salah satu sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Pembatasan pola konsumsi rokok, dimana dasar pengenaan cukai terhadap barang-barang tertentu dikarenakan sifatnya yang dapat “merugikan” konsumen.

Harga Jual Eceran (HJE) Hasil Tembakau ditetapkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat sesuai permohonan penetapan Harga Jual Eceran (HJE) yang diajukan pengusaha pabrik hasil tembakau bersangkutan, untuk tujuan pemasaran di dalam negeri maupun untuk ekspor. Selanjutnya pengusaha pabrik hasil tembakau dikelompokkan ke dalam Golongan Pengusaha Pabrik berdasarkan batasan produksi pabrik sesuai dengan jenis hasil tembakau yang diproduksi setiap tahun takwin.

3.1.7. Faktor Penentuan Tarif Sehubungan dengan Perkembangan Fungsi Cukai

Cukai sebagai salah satu unsur Pajak Tidak Langsung, mempunyai fungsi untuk:

- a. Menghimpun dana bagi Penerimaan Negara
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Menstabilkan harga
- d. Memberikan proteksi bagi industri dalam negeri
- e. Mencegah konsumsi barang mewah yang berlebihan

Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tertentu, Pemerintah ingin membatasi produksi, peredaran dan pemakaian barang kena cukai secara ketat melalui instrument tarif, yaitu dengan menetapkan tarif maksimum.

3.1.8. Pita Cukai Hasil Tembakau

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-42/BC/2016 tentang Bentuk Fisik dan /atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol tahun 2017, untuk pita cukai hasil tembakau digolongkan menjadi tiga seri, yaitu:

- a. Seri I berjumlah 120 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 0,8cm x 11,4cm.
- b. Seri II berjumlah 56 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,3cm x 17,5cm.

- c. Seri III berjumlah 150 keping perlembar dengan ukuran setiap keeping 1,9cm x 4,5cm.

Pita cukai hasil tembakau Seri I dan/atau Seri II digunakan untuk jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Tembakau Iris (TIS), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Cerutu (CRT), dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Sedangkan untuk pita cukai hasil cukai Seri III digunakan untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) , Sigaret Putih Mesin (SPM), dan Cerutu (CRT).

Pita cukai hasil tembakau memiliki cetakan dasar, masing-masing warna sebagai berikut:

- a. Warna merah kombinasi warna abu-abu, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT, dan SPTF yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan I.
- b. Warna merah kombinasi warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT, dan SPTF yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II.
- c. Warna biru kombinasi warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan IIIA.
- d. Warna hijau tua kombinasi warna biru tua, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan IIIB.
- e. Warna coklat kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL.
- f. Warna hijau kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau yang diimpor untuk dipaia di dalam daerah pabean.

3.2. Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau

Kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau mengacu kepada pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan peraturan mengenai tarif cukai hasil tembakau. Tarif cukai sendiri mengalami perubahan seiring perkembangan jaman dengan tujuan untuk penerimaan negara, untuk menciptakan sistem administrasi yang sederhana, faktor- faktor kesehatan, untuk dapat menekan peredaran rokok ilegal, untuk mengurangi konsumsi rokok. Perubahan- perubahan yang terjadi adalah kenaikan tarif cukai dan batasan harga eceran, penyederhanaan lapisan tarif.

Sehubungan dengan dengan kebijakan cukai hasil tembakau di tahun sebelumnya, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.010/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dengan ketentuan tarif cukainya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Berikut rincian tarif yang ditetapkan dalam PMK Nomor 198/PMK.010/2015:

Tabel 3.2.(a)
Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram
Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri
(PMK Nomor 198/PMK.010/2015)

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp 1.000,00	Rp 480,00
		II	Lebih dari Rp 740,00	Rp 340,00
			Paling rendah Rp 590,00 sampai dengan Rp 740,00	Rp 300,00
2.	SPM	I	Paling rendah Rp 930,00	Rp 495,00
		II	Lebih dari Rp 800,00	Rp 305,00
			Paling rendah Rp 505,00 sampai dengan Rp 800,00	Rp 255,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.115,00	Rp 320,00
			Paling rendah Rp 775,00 sampai dengan Rp 1.115,00	Rp 245,00
		II	Lebih dari Rp 605,00	Rp 155,00
			Paling rendah Rp 430,00 sampai dengan Rp 605,00	Rp 140,00
		IIIA	Paling rendah Rp 400,00	Rp 90,00
		IIIB	Paling rendah Rp 370,00	Rp 80,00

4.	SKTF atau SPTF	I	Paling rendah Rp 1.000,00	Rp 480,00
		II	Lebih dari Rp 740,00	Rp 340,00
			Paling rendah Rp 590,00 sampai dengan Rp 740,00	Rp 300,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 28,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 22,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 6,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 290,00	Rp 28,00
			Paling rendah Rp 200,00 sampai dengan Rp 290,00	Rp 22,00
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 22,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00
9.	HPTL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 305,00	Rp 110,00

Sumber: www.jdih.kemenkeu.go.id

Tabel 3.2.(b)

Tarif Cukai Dan Harga Jual Eceran Minimum Hasil Tembakau Yang Diimpor
(PMK Nomor 198/PMK.010/2015)

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1.	SKM	Rp 1.000,00	Rp 480,00
2.	SPM	Rp 930,00	Rp 495,00
3.	SKT atau SPT	Rp 1.116,00	Rp 320,00
4.	SKTF atau SPTF	Rp 1.000,00	Rp 480,00
5.	TIS	Rp 276,00	Rp 28,00
6.	KLB	Rp 291,00	Rp 28,00
7.	KLM	Rp 200,00	Rp 22,00
8.	CRT	Rp 198.001,00	Rp 110.000,00
9.	HPTL	Rp 305,00	Rp 110,00

Sumber: www.jdih.kemenkeu.go.id

Untuk tahun 2017, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.010/2016. Kenaikan tarif cukai tahun 2017 ini sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang Cukai dalam rangka pengendalian konsumsi, meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dari sektor cukai hasil tembakau, dimana sudah ada target pada APBN anggaran 2017. Lebih lanjut rincian tarif cukai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.(c)
Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau
(PMK Nomor 147/PMK.010/2016)

No. Urut	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		IIIA	Lebih dari 10 juta batang tetapi tidak lebih dari 500 juta batang
		IIIB	Tidak lebih dari 10 juta batang
4.	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLB atau KLM	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

Sumber: www.jdih.kemenkeu.go.id

Tabel 3.2.(d)
Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram
Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri
(PMK Nomor 147/PMK.010/2016)

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp 1.120,00	Rp 530,00
		II	Lebih dari Rp 820,00	Rp 365,00
			Paling rendah Rp 655,00 sampai dengan Rp 820,00	Rp 335,00
2.	SPM	I	Paling rendah Rp 1.030,00	Rp 555,00
		II	Lebih dari Rp 900,00	Rp 330,00
			Paling rendah Rp 585,00 sampai dengan Rp 900,00	Rp 290,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.215,00	Rp 345,00
			Paling rendah Rp 860,00 sampai dengan Rp 1.215,00	Rp 265,00
		II	Lebih dari Rp 730,00	Rp 165,00
			Paling rendah Rp 470,00 sampai dengan Rp 730,00	Rp 155,00
		IIIA	Paling rendah Rp 465,00	Rp 100,00
4.	SKTF atau SPTF	IIIB	Paling rendah Rp 400,00	Rp 80,00
		I	Paling rendah Rp 1.120,00	Rp 530,00
			Lebih dari Rp 820,00	Rp 365,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 655,00 sampai dengan Rp 820,00	Rp 335,00
			Lebih dari Rp 275,00	Rp 28,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 22,00
6.	KLB	Tanpa	Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 6,00
			Lebih dari Rp 290,00	Rp 28,00

		Golongan	Paling rendah Rp 200,00 sampai dengan Rp 290,00	Rp 22,00
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 22,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00
9.	HPTL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 305,00	Rp 110,00

Sumber: www.jdih.kemenkeu.go.id

Tabel 3.2.(e)
Tarif Cukai Dan Harga Jual Eceran Minimum Hasil Tembakau Yang Diimpor
(PMK Nomor 147/PMK.010/2016)

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1.	SKM	Rp 1.120,00	Rp 530,00
2.	SPM	Rp 1.030,00	Rp 555,00
3.	SKT atau SPT	Rp 1.215,00	Rp 345,00
4.	SKTF atau SPTF	Rp 1.120,00	Rp 530,00
5.	TIS	Rp 276,00	Rp 28,00
6.	KLB	Rp 291,00	Rp 28,00
7.	KLM	Rp 200,00	Rp 22,00
8.	CRT	Rp 198.001,00	Rp 110.000,00
9.	HPTL	Rp 305,00	Rp 110,00

Sumber: www.jdih.kemenkeu.go.id

Dalam kebijakan baru tersebut menyebutkan kenaikan tarif yaitu dengan rata-rata tertimbang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 10,52% (kisaran 7,35%-11,67%); Sigaret Putih Mesin (SPM) naik dengan rata-rata tertimbang 13,46% (kisaran 8,20%-13,73%); dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan IIIB naik dengan rata-rata tertimbang 8,68% (kisaran 0%-11,11%) diambil dengan memperhatikan kondisi perekonomian yang belum membaik. Pembebanan tarif tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan tenaga kerja sebagaimana yang terjadi di tahun 2016. Dengan komposisi tariff cukai tersebut, selain dapat menambah penerimaan negara di sektor cukai juga memberikan dampak positif pada penerimaan pajak rokok yang diperkirakan tumbuh sebesar 7,90%. Pada saat bersamaan batasan Harga Jual Eceran (HJE) minimum juga dinaikkan, untuk jenis SKM rata-rata sebesar

13,03% (kisaran 10,75%-15,84%), dan SKT rata-rata sebesar 12,38% (kisaran 8,11%-20,66%), dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,26%. Kenaikan HJE dimaksudkan agar harga hasil tembakau dipasaran tidak terlalu murah.

Dengan demikian, adanya perubahan kebijakan kenaikan tarif cukai untuk beberapa tahun terakhir ini, berikut ringkasan perkembangan kebijakan kenaikan tarif cukai lima tahun terakhir:

Tabel 3.2.(f)
Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Lima Tahun Terakhir

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (prognosa)
Kenaikan Tarif Cukai*	16,0%	6,0%	16,3%	8,5%	0%	8,7%	11,3%
Pajak Rokok (PR)	-	-	-	-	10%	10%	10%
Total Kenaikan (Cukai + PR)	16,0%	6,0%	16,3%	8,5%	10%	9,6%	12,5%
Harga Jual Eceran/HJE* (Rp/batang)	417,7	417,7	417,7	489,8	490,2	539,5	688,7
Harga Jual Eceran/HJE** (Rp/batang)	528,8	531,8	532,5	617,2	625,9	731,2	754
Rata-rata Tarif Cukai**	41,8%	45,3%	55,9%	50,6%	51,4%	48,2%	44,4%
Rata-rata Tarif Cukai** (Rp/batang)	220	240	283	308	318	355	405
Jumlah Layer Tarif	19	19	15	15	13	12	12
* rata-rata sederhana							
** rata-rata tertimbang							

Sumber: Kementerian Keuangan, Paparan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau

- Total kenaikan beban perpajakan di 2014 sebesar 10% karena pemberlakuan pajak rokok (10% dari tarif cukai), sementara di 2015 meningkat mejadi 9,6 %
- Pada tahun 2016, PPN HT dinaikkan dari tahun sebelumnya sebesar 8,4% menjadi 8,7%

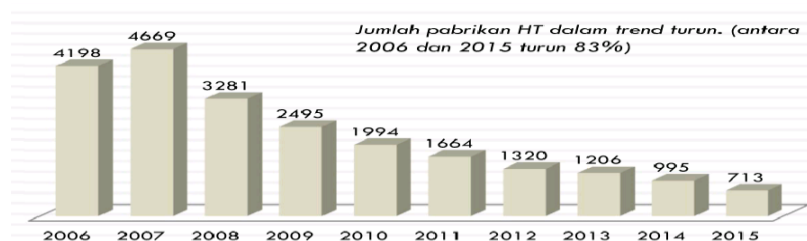
3.3. Industri Hasil Tembakau

Industri Hasil Tembakau mempunyai peran cukup besar terhadap penerimaan negara melalui pajak dan cukai, penyerapan tenaga kerja, penerimaan dan perlindungan terhadap petani tembakau dan dampak ganda yang lain. Pengembangan Industri Hasil Tembakau juga memperhatikan kesehatan masyarakat selain tetap mengusahakan agar industri dapat tumbuh dengan baik.

Permasalahan utama industri hasil tembakau adalah belum terwujudnya iklim kompetisi yang sehat, harga di tingkat konsumen yang terdistorsi, pasokan tembakau jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan dan mutunya rendah. Masing-masing permasalahan menjadikan Industri Hasil Tembakau saat ini masih belum optimal. Iklim kompetisi yang tidak terkendali yang mengakibatkan Industri Hasil Tembakau khususnya industri rokok kelas menengah ke bawah memerlukan perlindungan yang cukup memadai dari pemerintah agar dapat berkembang. Bahan baku utama Industri Hasil Tembakau, khususnya tembakau dan cengkeh, masih belum memiliki standar spesifikasi teknis seperti yang diperlukan industri. Akibatnya industri harus menanggung biaya *grading* ulang agar dapat dimanfaatkan secara benar dalam proses industri. Industri hasil tembakau berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien.

Gambar 3.3.(a)

Perkembangan Jumlah Pabrik Industri Hasil Tembakau Tahun 2006-2015



Sumber: Kementerian Keuangan, Paparan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau

Tabel 3.3.

Rincian Perkembangan Jumlah Pabrik Industri Hasil Tembakau Tahun 2015

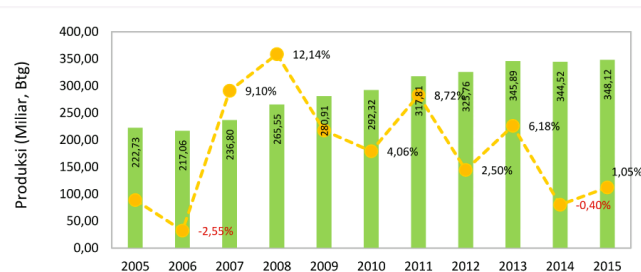
Jenis HT	Gol.	Jumlah Pabrik	% Pabrik	Penerimaan Cukai (Miliar Rp)	% Penerimaan Cukai
SKM	I	14	2,0%	91.155	73,8%
	IIA	84	11,8%	4.252	3,4%
	IIB	148	20,8%	5.761	4,7%
Jumlah		246	34,5%	101.168	81,9%
SKT	IA	1	0,1%	3.921	3,2%
	IB	15	2,1%	8.459	6,8%
	IIA	6	0,8%	452	0,4%
	IIB	15	2,1%	693	0,6%
	IIIA	88	12,3%	700	0,6%
	IIIB	316	44,3%	297	0,2%
Jumlah		441	61,9%	14.522	11,8%
SPM	I	1	0,1%	6.936	5,6%
	IIA	7	1,0%	305	0,2%
	IIB	18	2,5%	576	0,5%
Jumlah		26	3,6%	7.818	6,3%
Total		713			

Sumber: Kementerian Keuangan, Paparan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau

- Produksi berada di sekitar 345-348 miliar batang tiga tahun terakhir.
- Pertumbuhan produksi mengalami trend turun sejak 2008 pada lima tahun terakhir dengan rata-rata tumbuh 3,6% per tahun.
- Jumlah pabrikan hasil tembakau didominasi jensi Segaret Kretek Tangan (SKT) golongan IIIB sebesar 44%.
- Penerimaan cukai hasil tembakau didominasi oleh Sigaret Kretek Mesin(SKM) golongan I sebesar 73,8%.

Gambar 3.3.(b)

Persentase Produksi Hasil Tembakau di Indonesia



Sumber: Kementerian Keuangan, Paparan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau

Produksi rokok sejak lebih dari 10 tahun terakhir dikuasai oleh Sigaret Kretek Mesin (SKM) dibanding Sigaret Putih Mesin (SPM), hal ini menyangkut selera konsumen sendiri, hal tersebut berpengaruh pula dengan perolehan cukainya dari total produksi rokok di Indonesia.

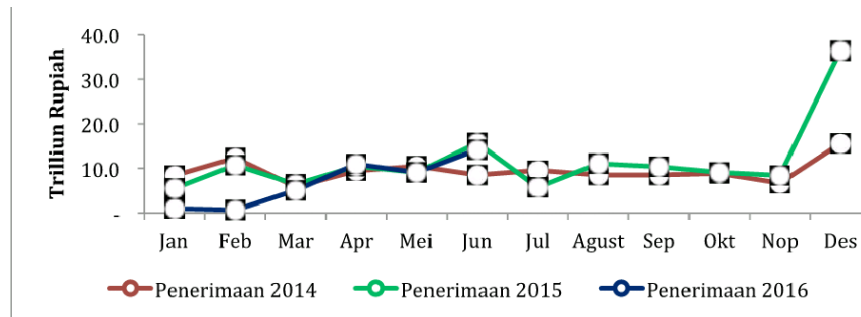
3.4. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, cukai hasil tembakau memiliki peran yang cukup penting. Pada tahun 2014 kontribusi cukai terhadap APBN adalah sebesar 12,29%, tahun 2015 sebesar 11,68%, dan tahun 2016 sebesar 11,72%. Di tahun 2017, ditargetkan penerimaan cukai sebesar 149,8 Triliun, yang merupakan 10,5% dari total penerimaan perpajakan.

Mengingat dominasi penerimaan cukai hasil tembakau dibanding pungutan cukai lainnya, wajar saja apabila konsentrasi terhadap kebijakan cukai hasil tembakau ini terlebih lebih intensif. Berikutnya dapat dilihat penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016:

Gambar 3.4.

Penerimaan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia



Sumber: Kementerian Keuangan, Paparan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau

Estimasi penerimaan cukai hasil tembakau pada semester I tahun 2016 sebesar Rp 40,8 triliun (29,2% dari target), sedangkan pada periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp 58,3 triliun (41,9% dari target). Pada semester I tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 karena dampak pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.04/2015 tanggal 2 Februari 2015 dimana pelunasan cukai atas pemesanan pita cukai tahun 2015 yang jatuh tempo pada bulan Januari dan Februari 2016 harus dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2015, sehingga penerimaan pada Januari dan Februari 2016 relatif kecil. Disamping faktor tersebut, perlambatan kondisi perekonomian nasional dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya merokok mengakibatkan penurunan produksi hasil tembakau pada semester I sebesar 3,9%.

Dari sisi penerimaan negara, benar bahwa penerimaan negara melalui cukai sangat tinggi dan terealisasi dengan baik. Departemen keuangan sudah bekerja dengan baik sehingga dana tersebut mendapatkan angka yang baik. Namun, tanpa disadari oleh pemerintah kebijakan tersebut dapat menyulitkan industri hasil tembakau untuk bertahan.

3.5. Dampak Adanya Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau

Kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau secara tidak langsung akan menaikkan harga dari produk rokok di Indonesia. Kebijakan tersebut pun menarik perhatian berbagai pihak. Tingginya jumlah konsumen rokok di Indonesia menjadi alasan utama. Saat ini, harga rokok hanya senilai Rp 20.000,- perbungkus atau dibawahnya. Dengan harga yang cukup terjangkau tersebut, tidak heran jika banyak orang yang mengonsumsi rokok, termasuk para pelajar yang menganggap harga tersebut cukup murah. Karena itu, kenaikan harga rokok akan berdampak besar bagi para dunia bisnis rokok, termasuk para perokok itu sendiri. berikut dampak yang terjadi akibat adanya kebijakan kenaikan tarif cukai di Indonesia:

3.5.1. Dampak Positif

Ada beberapa dampak positif dari adanya kebijakan kenaikan tarif cukai, diantaranya:

a. Meningkatkan Pendapatan Negara

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara bertujuan untuk kebaikan bersama khususnya dalam mencapai pembangunan nasional. Negara akan memiliki anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain. Misalnya untuk sektor kesehatan dan Pendidikan.

b. Mengurangi Krisis Kesehatan

Sudah bukan rahasia umum jika rokok dapat merusak kesehatan, terutama paru-paru. Informasi tentang efek buruk merokok juga sudah tertera di kemasan rokok. Sudah banyak kasus kesehatan yang disebabkan dari kebiasaan merokok. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Kasus tersebut tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, melainkan perokok pasif pun bisa terkena dampak dari asap rokok disekitarnya. Jadi dengan adanya kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (harga rokok), kasus kesehatan yang disebabkan oleh rokok akan berkurang.

c. Frekuensi Konsumsi Rokok Semakin Menurun

Mungkin perokok tidak langsung memutuskan untuk berhenti merokok namun mulai mengurangi frekuensi jumlah rokok yang di habiskan dalam sehari.

d. Banyak Orang Berhenti Merokok

Sudah disebutkan sebelumnya, jika harga rokok dinaikan, para pecandu rokok mulai berpikir untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Maka akan banyak orang yang kini berhenti merokok. Alasannya karena harga rokok sudah tidak terjangkau lagi.

e. Bisa Berinvestasi

Jika memang harga rokok naik, maka para konsumen akan lebih irit dalam pengeluaran. Uang yang tadinya mereka keluarkan untuk kebutuhan merokok, kini tidak perlu lantaran harga rokoknya yang mahal dan orang tersebut mulai mau berhenti. Efek dari hal ini adalah uang tersebut bisa disimpan atau diinvestasikan untuk hal lain atau membeli kebutuhan lain. Intinya, orang-orang tersebut sudah tidak membeli rokok yang harganya mahal dan lebih memilih mengalokasikan dana untuk menabung di kemudian hari.

f. Lingkungan Lebih Sehat

Menurut penelitian asap rokok lebih banyak mengandung polusi dan zat berbahaya dibanding polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan. Jadi dengan berkurangnya perokok kondisi lingkungan semakin sehat dan udara semakin bersih dari polusi asap rokok.

g. Biaya Subsidi Kesehatan Masyarakat Akan Berkurang

Sama halnya dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi, biaya kesehatan juga ditanggung pemerintah terhadap pihak-pihak tertentu. Harga rokok yang tinggi akan membuat sebagian perokok berhenti merokok dengan tidak merokok, maka kesehatan masyarakat akan menjadi lebih baik.

h. Generasi Muda Penerus Bangsa Akan Terselamatkan

Menurut penelitian 60-80% anak sekolah menengah sudah merokok. Hal ini menjadi sangat memprihatinkan karena merekalah generasi yang diharapkan menjadi pemegang estafet untuk memajukan bangsa. Maka jika kenaikan harga rokok benar terealisasi berarti kita telah menyelamatkan generasi muda bangsa ini.

3.5.2. Dampak Negatif

Berikut ini merupakan dampak negatif dari adanya kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (harga rokok):

a. Bertambahnya Jumlah Pengangguran

Industri hasil tembakau melibatkan banyak pekerja mulai dari proses produksi hingga distribusi ke konsumen. Katakanlah pekerja buruh pelinting rokok, pemetik cengkeh dan lain sebagainya. Meningkatnya harga rokok dikhawatirkan akan ada PHK besar-besaran dari karyawan perusahaan industri hasil tembakau, sehingga mengakibatkan bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Selain para pekerja industri, pihak lain yang dirugikan yaitu petani tembakau. Jika ditekan dengan pajak dan cukai yang tinggi, maka petani tembakau akan berpotensi kehilangan pekerjaan mereka.

b. Matinya Pengusaha Industri Rokok Kecil

Kenaikan tarif rokok sangat merugikan bagi produsen rokok yang ada terutama pabrik-pabrik rokok. Jika begini pabrik rokok kecil tidak akan mampu bersaing dengan pabrik rokok besar. Dan seiring berjalannya waktu hasil produksi pabrik-pabrik rokok kecil akan mulai menurun.

c. Merebaknya Rokok Ilegal

Secara teori, ketika pajak terlalu tinggi, akan ada dampak berupa produk ilegal. Permintaan akan rokok yang legal akan terjadi penurunan memungkinkan para pecandu rokok, khususnya masyarakat kelas bawah akan mencari cara lain agar mereka tetap dapat mengonsumsi rokok, yaitu melinting sendiri dengan tembakau pasaran atau kemungkinan dengan mengonsumsi rokok ilegal. Mengingat salah satu tujuan dinaikkan harga rokok adalah untuk membatasi jumlah perokok di Indonesia, namun jika masyarakat punya jalan keluar lain dengan mengonsumsi rokok ilegal, kebijakan ini menjadi tidak efektif. Apalagi jika peredaran rokok ilegal tersebut terdistribusi luas. Percuma menaikkan harga rokok tetapi konsumennya tetap saja banyak.

d. Meningkatnya Jumlah Kriminalitas

Hanya karena harga rokok semakin mahal tidak serta-merta jumlah perokok menurun dalam waktu singkat. Yang paling menderita dengan naiknya rokok ini adalah perokok kelas bawah. Rendahnya tingkat ekonomi seringkali dihubungkan dengan kriminalitas. Tidak menutup kemungkinan dengan naiknya harga rokok ini angka kriminalitas ikut naik untuk memenuhi candu akan rokok. Sulitnya mendapatkan rokok karena mahal sehingga tindakan criminal bisa menjadi jalan keluar.

Terkadang kita tidak menyadari, bahwa sebuah kebijakan akan mempengaruhi di dua sisi, yaitu dampak baik dan dampak buruk. Pemerintah selaku aktor politik harus mempertimbangkan dengan matang dan tidak memementingkan egonya dalam mengambil keputusan untuk menaikkan harga rokok. Karena imbasnya akan sangat besar terhadap negara mengingat rokok sendiri merupakan salah satu penghasil devisa tertinggi di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Rangkuman

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. maka sesuai perkembangan hukum nasional dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995).

Cukai yang merupakan bagian dari penerimaan pajak tidak langsung sebagaimana dinyatakan dalam struktur APBN, mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat kontribusi cukai terhadap APBN hingga kini berada pada kisaran 10-12%. Untuk tahun 2014 kontribusi cukai terhadap APBN adalah sebesar 12,29%, tahun 2015 sebesar 11,68%, dan tahun 2016 sebesar 11,72%. Di tahun 2017, ditargetkan penerimaan cukai sebesar 149,8 triliun, yang merupakan 10,5% dari total penerimaan pajak.

Penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016, diharapkan dapat mengendalikan konsumsi, meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dari sektor cukai hasil tembakau, dimana sudah ada target pada APBN anggaran 2017.

Adanya kebijakan kenaikan tarif hasil tembakau tentunya akan memberikan dampak bagi berbagai pihak, khususnya bagi industri tembakau (pengusaha tembakau, petani, tenaga kerja pabrik) maupun konsumen sendiri. Maka dalam kebijakan yang berkaitan, pemerintah harus mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif dan berimbang, baik dalam upaya untuk kesehatan masyarakat, tenaga kerja, peredaran rokok ilegal, petani tembakau, penerimaan negara, maupun berbagai aspek lainnya.

4.2. Kesimpulan

Dalam Undang-Undang Cukai dikatakan, hasil tembakau termasuk barang yang dikenakan cukai karena itu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, karena pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan kenaikan tarif cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.010/2016. Kebijakan ini tentunya sudah memperhatikan berbagai aspek dari seluruh mata rantai industri tembakau nasional.

Secara umum tidak banyak perbedaan antara kebijakan kenaikan tarif cukai di tahun ini dengan tahun sebelumnya. Namun di tahun 2017 ini lebih diarahkan kepada kebijakan cukai hasil tembakau yang dimulai dengan mempersempit gap tarif cukai perlayer, perubahan batasan produksi, dan menentukan titik optimalisasi penerimaan cukai.

Untuk itu, kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dibuat haruslah berimbang, sehingga memiliki pengaruh yang baik terhadap perekonomian, khususnya pada sektor lapangan pekerjaan dan kesempatan hidup bagi industri kecil. Kenaikan tarif tersebut diharapkan agar tujuan kebijakan cukai hasil tembakau dapat tercapai yakni konsumsi rokok terkendali, keberlangsungan tenaga kerja terjaga, target penerimaan cukai tercapai, dan peredaran rokok ilegal dapat diminimalisir. Jadi diharapkan kebijakan yang akan dibuat untuk menaikkan tariff cukai hasil tembakau tersebut dapat memberi solusi bagaimana menanggulangi permasalahan yang ada, agar kebijakan tersebut tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Granit, edisi 3.
- Ahmad, Dimyati, Drs. 2011. *Diklat Teknis Substantif Dasar Kepabeanan dan Cukai*. Widyaswara Madya.
- Surono. 2013. *Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau*. Jakarta: Widyaaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Baber, S., Adioetomo, S.M., Ahsan, A., dan Setyonaluri, D. 2008. *Ekonomi Tembakau di Indonesia*. Paris: International Union Against Tuberculosis dan Lung Disease.
- Permana, Agung, DR, MSc. 1999. *Optimalisasi Tarif Cukai Tembakau Suatu Analisis dengan Kurva Laffer*. Jakarta.
- Ahsan dan Tobing. 2008. *Ekonomi Tembakau di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Guyani, Gugun El, dkk. 2013. *Ironi Cukai Tembakau: Carut-marut Hukum & Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Kuncoro, M. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, Edisi Ketiga.
- Pambudi, Heru. 2016. *Realisasi Penerimaan Bea Cukai Tahun 2016 Semester I*. Jakarta: Warta Bea Cukai, Volume 48, Nomor 7 Juli 2016.

Peraturan Perundang- Undangan:

Republik Indonesia. 2003. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.

Republik Indonesia, 1995. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 *tentang Cukai*.

Republik Indonesia, 2007. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 *tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*.

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 *tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 *tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 *tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 *tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2014 *tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan*.

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 *tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*.

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.04/2014 *tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya.*

Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 71/BC/2015 *tentang Pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang.*

Internet:

Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : <http://www.beacukai.go.id/>

Website Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Semarang: <http://bcsemarang.beacukai.go.id/>

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160822_indonesia_rokok_naik

<http://news.ddtc.co.id/mobile/artikel/8156/kebijakan-cukai-begini-dampak-kenaikan-tarif-cukai-rokok/>

<http://jurnalmepekonomi.blogspot.co.id/2010/05/analisis-kebijakan-cukai-terhadap.html?m=1>